

'KICK OFF' DI OBWIS WATU LEMPENG

Bupati Ajak Sukseskan Program Sambanggo

NANGGULAN (KR) - Objek wisata (Obwis) Watu Lempeng di Pedukuhan Brangkal Kalurahan Banyuroto Kapanewon Nanggulan dinilai layak menjadi lokasi *kick off* program Sambanggo Kulonprogo (Sambanggo) tahun 2022.

"Sejumlah alasan kami melaksanakan *kick off* Program Sambanggo 2022 di obwis ini. Di antaranya Obwis Watu Lempeng diinisiasi, dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat sekitar melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Sehingga, aspek tersebut masuk kriteria kami," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) setempat, Joko Mursito SSn MA di sela acara, Jumat (21/1).

Sambanggo, program promosi untuk menarik perhatian wisatawan terhadap sejumlah obwis di Kulonprogo. Sehingga, obwis yang dinilai berpotensi mengundang kunjungan wisatawan dan membutuhkan sejumlah perbaikan maupun penambahan infrastruktur menjadi perhatian Dispar Kulonprogo.

"Pemerintah dalam hal ini Dispar mempunyai ke-



KR-Asrul Sani

Di sela *kick off* Program Sambanggo di Obwis Watu Lempeng Nanggulan, Bupati Sutedjo menyerahkan bantuan pembangunan musala.

wajiban memfasilitasi sejumlah obwis yang dikelola masyarakat. Program Sambanggo memang bersumber dana keistimewaan (Da-nais). Sehingga, upaya mendukung terciptanya obwis yang berkelanjutan sangat dimungkinkan," jelasnya.

Seperti halnya pelaksanaan Sambanggo tahun lalu, program Sambanggo tahun ini juga menyasar 10 obwis tersebar di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Sambanggo juga hadir guna mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi lokal khususnya dari sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

"Melalui Program Sambanggo kami berupaya membangkitkan sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Seiringan dengan itu sektor lain seperti perdagangan, perindustrian dan UMKM juga mengikuti bangkit. Sehingga masyarakat berdaya dan perekonomian masyarakat lokal berkembang sehingga lepas dari keterpurukan akibat pandemi," ujar Joko Mursito.

Bupati Sutedjo menyatakan mendukung pelaksanaan Program Sambanggo tahun 2022 yang ditandai *kick off* di Obwis Watu Lempeng. (Rul)

TERJADI PERUBAHAN SIKLUS

DBD Meningkat, Sebulan 28 Kasus

WONOSARI (KR) - Angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gunungkidul pada Januari 2022 meningkat. Hingga memasuki minggu ketiga sudah dilaporkan terjadi 28 pasien yang menjalani perawatan. Sekretaris Dinas Kesehatan Gunungkidul

Abdul Aziz peningkatan kasus DBD pada bulan Januari ini tidak seperti biasa dan terjadi perubahan siklus kasus DBD tahun 2022 dibanding tahun 2021 lalu. "Biasanya kasus DBD akan tinggi pada bulan November atau Desember saat ini justru terjadi pada Januari," katanya, Jumat (21/1).

Terkait perubahan siklus ini pihaknya terus mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan masing-masing.

Dari catatan Dinas Kesehatan, pada tahun 2021 kemarin terdapat 180 kasus DBD, dengan korban meninggal dunia 3 orang, dan seluruhnya terjadi pada bulan Desember. Menurutnya kenaikan angka kasus ini berkaitan dengan awal musim

penghujan, dimana biasanya ketika curah hujan tinggi mengakibatkan banyak genangan air terjadi di dekat pemukiman penduduk.

"Dari genangan air ini, jentik nyamuk berkembang dan populasi nyamuk akan bertambah dengan cepat," imbuhnya.

Untuk mencegah penyakit DBD menjaga kebersihan lingkungan sangat penting, karena itu masyarakat harus ditumbuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Untukantisipasi Jentik maka pola 3M, yaitu Menguras, Menutup dan Mengubur harus digencarkan. Juga program Juman-tik (Juru Pemantau Jentik), harus ada di setiap rumah. Terkait pergeseran siklus bahwa saat ini genangan air tidak hanya tergantung curah hujan. Namun, dengan perkembangan teknologi pemanfaatan air, terutama pengeboran, menyebabkan banyak air yang menggenangi meski curah hujan rendah. "Hal ini juga berpengaruh dan menyebabkan perubahan siklus penyakit demam berdarah, karena banyak genangan, maka jentik-jentik nyamuk berkembang biak," terangnya. (Bmp)

TENAGA HONORER MASIH DIBUTUHKAN

Menutup Kekurangan Pegawai

WONOSARI (KR) - Rencana menghapus tenaga honorer atau non-PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada 2023 yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Kabupaten Gunungkidul Cukup berat diterapkan di Gunungkidul.

Bupati H Sunaryanta menilai tenaga honorer masih dibutuhkan. Pasalnya, ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai masih sangat kurang. "Tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk menutupi kekurangan tenaga kepegawaian," katanya, Jumat (21/1).

Meskipun demikian, Sunaryanta tetap akan mengikuti kebijakan pe-

merintah pusat jika rencana tersebut benar-benar direalisasikan. Terutama dalam hal penghapusan tenaga honorer di 2023 nanti.

Pihaknya juga akan mendata hingga mengkaji jumlah tenaga honorer di Gunungkidul. Namun prosesnya masih menunggu bagaimana detail dari aturan tersebut. "Akan kami lihat dulu aturan soal tenaga

honorer ini," imbuhnya.

Kepala Bidang Formasi dan Data Pegawai, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul, Agus Sumaryono mengatakan masih akan menunggu petunjuk dan regulasi dari pusat.

Hingga akhir 2021 lalu wilayahnya terdapat sebanyak 1.021 tenaga honorer atau tenaga kontrak di Gunungkidul.

Menurutnya, beberapa di antaranya sudah diterima sebagai CPNS dan PPPK, namun belum melapor. Ada juga yang menjadi guru pengganti dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan, tapi jumlah pastinya belum diketahui. (Bmp)

Lurah Harus Mampu Perbaiki Data Kemiskinan

PENGASIH (KR) - Sebanyak 69 lurah di Kabupaten Kulonprogo yang dilantik akhir November 2021 agar mampu melakukan perbaikan data kemiskinan setiap kalurahan sebagai landasan dalam percepatan pengentasan kemiskinan berbasis wilayah. Tidak hanya melakukan pembenahan data kemiskinan, namun membuat profil potret kemiskinan.

"Kami minta setiap lurah baru memiliki potret kemiskinan di wilayahnya. Dimulai dari nama warga yang miskin, alamat, pekerjaan sampai yang menyebabkan warga itu miskin. Sehingga program penanganan kemiskinan yang diambil pemerintah, anggota DPRD Kulonprogo melalui program aspirasi dan lurah sangat jelas dan tepat sasaran," kata Akhid Nuryati SE Ketua DPRD



KR-Widiastuti

Akhid Nuryati
Kabupaten Kulonprogo, Jumat (21/1).

Menurut Akhid, program pengentasan kemiskinan ini banyak, tapi di masa pandemi Covid-19, angka kemiskinan di Kulonprogo masih tinggi yaitu 18,38 persen. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bersama untuk melakukan pembenahan program pengentasan kemiskinan hingga data kemiskinan, agar bisa dicarikan solusi yang tetap.

Data kemiskinan yang dianggap valid adalah da-

ta yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mengukur tingkat kemiskinan itu dari kebutuhan kalori, dan kebutuhan konsumsi pangan dan sandang atau kebutuhan primer dan sekunder.

BPS berasumsi makan itu dalam satu meja ada nasi, lauk, sayur dan segala macam. Sedangkan makanan pengganti beras, seperti makan lontong dianggap tidak makan.

Akhid tidak pula menutup mata buruknya data kemiskinan di Kulonprogo, meski pemkab seringkali mengatakan sudah membenahi data kemiskinan.

Banyak warga yang tidak pantas menerima bantuan, masih mendapat bantuan, dan begitu sebaliknya warga yang berhak mendapat bantuan justru tidak mendapat bantuan. "Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMDDalduKB) agar mendorong 69 lurah yang dilantik membuat protret kemiskinan sebelum menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) yang disahkan pada Februari," ujarnya.

Mengatasi persoalan kemiskinan, tambah Akhid, seperti makan lontong dianggap tidak makan.

DPRD Kulonprogo sejak dulu mengusulkan kepada pemkab untuk memasang plakat bukti kemiskinan di setiap rumah penduduk miskin. Berdasar informasi, masyarakat yang memiliki mobil mendapat bantuan, memiliki banyak sepeda motor dapat bantuan. Ini membutuhkan kebijakan besar untuk melakukan perombakan data kemiskinan. (Wid)

DIRJEN PUPR TINJAU SEROPAN-SPAM BARON

Kapasitas Air Baku Dukong Pembangunan WTP-IKK

WONOSARI (KR) - Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anang Muchlis meninjau Sungai Bawah Tanah, Seropan, Kapanewon Ponjong, Kamis (20/1). Kedatangan Anang Muchlis dan rombongan untuk memastikan kesiapan program Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolah Air (IPA) di Seropan sebesar 200 liter per detik. "Kapasitas air baku sungai bawah tanah seropan mencukupi dengan debit 950 liter per detik dan baru dimanfaatkan 190 liter per detik. Sehingga masih ada *eadle capacity* yang cukup memadai. Mendukung kesiapan lahan pembangunan WTP di Seropan dan PDAM Tirta Handayani memiliki

lahan sekitar 5000 M2," kata Anang Muchlis. Kunjungan ini tindak lanjut sebelumnya Menteri PUPR Basoeki Hadimoeliono meninjau lokasi yang sama. Rombongan juga meninjau calon Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Baron atau SPAM Ibu Kota Kapanewon (IKK) Tanjungsari dengan kapasitas 100 L/D existing. Nantinya pembangunan dilakukan secara bertahap.

Rombongan disambut Tim Bupati untuk Percepatan Penyelenggaraan Pembangunan (TBUP3) Bambang Riyanto dan Direktur PDAM Tirta Handayani Toto Sugiharto. Bambang Riyanto memastikan April 2022 selesai tahap pembersihan, pematangan dan penyiapan lahan. Sehingga layanan air minum di Semanu, Ponjong, Ka-



KR-Istimewa

Toto Sugiharto menunjukkan skema WTP Seropan kepada Anang Muchlis.

rangmojo, Semin, Ngawen, dan sebagian Wonosari lebih maksimal.

"Pelanggan Tepus dan Rongkop WTP Seropan sisi kualitas, kuantitas dan kontinuitas meningkat. Masalah air keruh dan sistem penggiliran dapat teratasi," ucapnya. Direktur Utama PDAM Tirta Handayani Toto Sugiharto STP menyatakan, terus melakukan koordinasi terkait skema pe-

merintah pusat.

Jika optimalisasi SPAM IKK Tanjungsari terlaksana, akan mendukung layanan di Tanjungsari dan Tepus. Menghapus stigma Tepus daerah rawan kekerangan.

Harapannya zona selatan, khusus pantai dapat terlayani dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air yang lebih baik. (Ded)

PEMBERLAKUAN MIGOR SATU HARGA

Timbulkan Kelangkaan Minyak di Gunungkidul



KR-Endar Widodo

Dipedag tinjau migor subsidi.

WONOSARI (KR) - Dampak pemberlakuan minyak goreng (migor) satu harga Rp 14 ribu, selain hanya dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas, juga menimbulkan kelangkaan migor di Gunungkidul. Toko retail Alfamart dan Indomart yang ditunja oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aprindo) untuk tempat penjualan perse-

diaannya tidak mencukupi. Dalam waktu singkat persediaan di toko langsung terbeli habis. Konsumennya hanya terbatas orang-orang yang punya akses mudah dan cepat. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kota tidak tersentuh harga minyak goreng murah tersebut. "Penerapan migor satu harga dengan jumlah dan tempat pelayanan ter-

batas ini menyebabkan kelangkaan minyak goreng" kata Kadin Perdagangan Gunungkidul Kelik Yuni-antoro SSos MM dalam sidaknya, Kamis (20/1).

Ikut serta dalam sidak, Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Drs H Supriyadi, wakil ketua Ari Siswanto SE dan anggota lain, Ismail Ishom, Sukardi dan Kuswari. Di Alfamart Kepek Wonosari tempat pajangan minyak kosong. Menurut petugas untuk menghindari pembelian borong, pematangan pada rak diatur sedemikian rupa agar tidak ada pembelian dalam jumlah banyak oleh seseorang atau beberapa orang saja. Ketika rombongan mengecek ke swalayan Pamela 9 stok maupun rak minyak kosong. "Swalayan ini belum

mendapatkan jatah migor subsidi. Sehingga belum mendapatkan kiriman migor bersubsidi," tambahnya.

Untuk mengatasi kelangkaan migor dan mengjangkar seluruh lapisan masyarakat, kata Ketua Komisi D Yng mbedidangi kesejahteraan rakyat Drs H Supriyadi, mendukung pemerintah untuk melakukan operasi pasar besar-besaran. Jika kurang modal dapat bekerja sama dengan PT Bank BDG dan BPD. Pola sekarang ini jangkauannya terbatas. Masyarakat pedesaan tidak dapat mengakses. "Selain itu masyarakat sebaiknya mulai melakukan gerakan pengurangan konsumsi migor" ujar Wakil Ketua Komisi D DPR D Gunungkidul Ari Siswanto SE. (Ewi)

POHON ROBOH DITERJANG ANGIN

1 Rumah Warga Balong Hancur

WONOSARI (KR) - Sebuah pohonjenis beringin berusia ratusan tahun tumbang menimpa rumah Samit (57) warga Widoro, Kalurahan Balong, Kapanewon Girisubo, Gunungkidul Rabu (19/1) petang. Beruntung saat peristiwa terjadi tidak menimbulkan korban karena pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. "Proses evakuasi berlangsung cukup lama lantaran besarnya batang pohon dan ranting yang cukup rimbun," katanya, Kamis (20/1).

Kapolsek Girisubo, AKP Wasdiyanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya pohon berusia ratusan tahun yang tumbang di wilayahnya. Menurut Wasdiyanto, pohon tersebut tumbang menimpa rumah milik Samit. Terkait peristiwa tersebut Jajaran Polsek Girisubo bersama SAR Satlinmas

dan petugas PLN yang dibantu warga sekitar langsung terjun lapangan untuk mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Proses evakuasi sendiri dipercepat untuk membuka akses jalan yang tertutup lantaran batang pohon yang tumbang melintang di jalan. "Untuk pohon yang menutup jalan sudah dapat dievakuasipada malam tadi," imbuh Kapolsek.

Diperkirakan, pohon berusia ratusan tahun tersebut tumbang lantaran tak kuat menahan hembusan angin serta hujan deras yang terjadi cukup deras sejak sehari sebelumnya. Tidak hanya pohon beringin yang tumbang tetapi ada beberapa pohon lain yang juga tumbang. Tetapi hanya menimbulkan kerusakan satu rumah. (Bmp)